

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN (STUDI KASUS: KOPERASI SYARIAH BMT
MASYARAKAT MADANI SUMUT)**

Oleh:

BAYU LIAN SURBAKTI
NIM 51143008

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN (STUDI KASUS: KOPERASI SYARIAH BMT
MASYARAKAT MADANI SUMUT)**

Oleh:

BAYU LIAN SURBAKTI
NIM 51143008

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

Skripsi berjudul “ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS: KOPERASI SYARIAH BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT)”. Bayu Lian Surbakti, NIM. 51143008 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 11 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

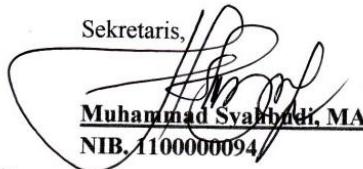
Medan, 11 Oktober 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

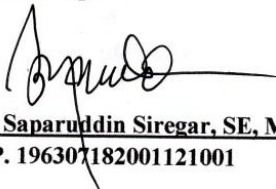
Sekretaris,



Muhammad Syahbadi, MA
NIB. 1100000094

Anggota

Pembimbing I



Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag
NIP. 196307182001121001

Pembimbing II



Kusmilawaty, SE, Ak, M.Ak
NIP. 198006142015032001

Penguji I



Dr. Maylivah, MA
NIP. 197601262003122003

Penguji II




Kamilah, SE, M.Si
NIP. 197910232008012014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan




Dr. Andri Soemitra, M.Ag
NIP. 197605072006041002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Bayu Lian Surbakti**
Nim : 51143008
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 24 Maret 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Banten Baru, Kelambir V, Medan Helvetia

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul: "**ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS: KOPERASI SYARIAH BMT MASYARAKAT MADANI SUMATERA UTARA**" benar hasil karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 September 2018

Yang Membuat Pernyataan



Bayu Lian Surbakti

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN (STUDI KASUS: KOPERASI SYARIAH BMT
MASYARAKAT MADANI SUMATERA UTARA)**

Oleh:

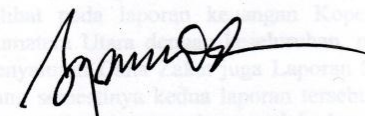
BAYU LIAN SURBAKTI

NIM. 51143008


Dapat Ditetujui Sebagai Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah

Medan, September 2018


Pembimbing I


Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag
NIP. 196307182001121001

Pembimbing II


Kusmilawaty, SE, Ak, M.Ak
NIP. 198006142015032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah


Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

ABSTRAK

BAYU LIAN SURBAKTI, NIM. 51143008. ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS: KOPERASI SYARIAH BMT MASYARAKAT MADANI SUMATERA UTARA). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, yang terdiri dari laporan neraca, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, untuk mengetahui bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan PSAK 101. Metode wawancara digunakan untuk memperkuat dan memperdalam kajian terhadap objek yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal sistematika penyajian laporan keuangan. Selanjutnya dilakukan penyesuaian dan pembandingan dua unsur, yakni Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara Tahun 2017, dan PSAK 101 tentang standar penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara sudah menyajikan laporan keuangannya dengan benar sebagaimana yang disyaratkan dalam PSAK 101 dan dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang penyajian laporan keuangan. Namun, jika dilihat pada laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara dengan keseluruhan, maka tidak terdapat Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat juga Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan yang semestinya kedua laporan tersebutlah yang menjadi titik perbedaan antara laporan keuangan entitas syariah dan laporan keuangan konvensional. Dengan penelitian ini diharapkan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara melengkapi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101.

Kata Kunci: PSAK 101, Penyajian Laporan Keuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara)” dengan baik lancar. Adapun tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar S1 Akuntansi Syariah. Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Drs.Mhd. Syahman Sitompul, SE, AK, M.SI, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang berkontribusi banyak dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Peneliti selama perkuliahan.
4. Bapak Hendra Harmain, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Ibu Kamila, M.Si selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Sapparuddin Siregar, SE, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.
7. Ibu Kusmilawaty, SE, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.

8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
9. Bapak Yusman, S.Ag, MA, selaku ketua pengurus Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti.
10. Kepada keluarga tercinta khususnya Ayah dan Ibu, serta kakak dan adik saya yang tidak pernah bosan memberikan doa dan semangat.
11. Kepada orang-orang terdekat saya yaitu: Yuni Tanjung, Rahmat Yamin Harahap, Wiwit Muliono, Fitri Rahmadani, Siska Yunita, dan Siti Aisyah yang tidak pernah bosan memberikan kritik dan saran.
12. Kepada seluruh teman seperjuangan saya Aks A dan Teman KKN.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 29 September 2018

Bayu Lian Surbakti

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akuntansi Keuangan Konvensional	7
B. Akuntansi Keuangan Syariah.....	10
C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101	16
D. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	38
E. Penelitian Relevan.....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	50
B. Subjek dan Objek Penelitian	51
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	56
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	56
2. Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut	64

B. Pembahasan.....	68
1. Analisis Terhadap Format Neraca.....	68
2. Analisis Terhadap Format Laporan Laba Rugi	70
3. Analisis Terhadap Format Laporan Perubahan Ekuitas.....	70
4. Analisis Terhadap Format Laporan Arus Kas.....	71
5. Analisis Terhadap Format Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	71
6. Analisis Terhadap Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	72
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL& GAMBAR

Tabel 1.1 Penyajian Posisi Laporan Keuangan Menurut PSAK 101	20
Table 1.2 Penyajian Laporan Laba Rugi Menurut PSAK 101	22
Tabel 1.3 Penyajian Laporan Arus Kas Menurut PSAK 101	25
Table 1.4 Penyajian Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Menurut PSAK 101	27
Table 1.5 Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Menurut PSAK 101	28
Table 2.1 Penyajian Laporan Neraca Menurut KSPPS	41
Table 2.2 Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha Menurut KSPPS ...	43
Table 2.3 Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Menurut KSPPS	44
Table 2.4 Penyajian Laporan Arus Kas Menurut KSPPS	45
Table 2.5 Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Menurut KSPPS	46
Table 2.6 Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Menurut KSPPS	47
Table 3.1 Profil BMT Masyarakat Madani Sumut	57
Table 4.1 Penyajian Laporan Neraca Kopsyah BMT Masyarakat Madani Sumut	64
Table 4.2 Penyajian Laporan Laba Rugi Kopsyah BMT Masyarakat Madani Sumut	65
Table 4.3 Penyajian Laporan Arus Kas Kopsyah BMT Masyarakat Madani Sumut	66
Gambar 1.1 Logo Kopsyah BMT Masyarakat Madani Sumut	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan. Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset perusahaan atau pemegang saham dan sebagainya atau media utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan.¹

Akhir akhir ini terjadi suatu peningkatan terhadap kajian bidang akuntansi menuju akuntansi dalam perspektif Islami atau akuntansi syariah. Beberapa isu yang mendorong munculnya akuntansi syariah adalah masalah harmonisasi standar akuntansi internasional di negara-negara Islam. Salah satu aspek yang mendorong akuntansi dengan perspektif Islam atau akuntansi syariah di Indonesia adalah dengan munculnya perbankan syariah. Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dalam jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan oleh Islam.²

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa PSAK Syariah berlaku bagi entitas syariah yang menjalankan transaksi syariah. Entitas syariah yang dimaksud dalam PSAK adalah entitas syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah ini hanya ditujukan bagi entitas syariah yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan berbagai bentuk badan hukum bisa dipergunakan

¹Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 5.

²Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah: PSAK 101*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017) Paragraf 3-6.

(misalnya: Perseroan Terbatas, CV, Koperasi, Yayasan) yang memerlukan penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. namun demikian, harus secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya bahwa usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lainnya yang digabungkan kedalam kelas-kelas sesuai sifat dan fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan diklasifikasikan yang membentuk pos-pos dalam laporan keuangan.

Baitul Maal wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan dengan konsep berbasis syariah yang lahir sebagai pilihan dengan menggabungkan konsep *maal* dan *tanwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah. Sedangkan untuk konsep tamwil merupakan lahir dari kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan sector masyarakat menengah kebawah (mikro usaha).³

BMT juga sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta mengolah dana masyarakat tersebut dalam hal yang bersifat *Nirlaba (not profit)*. Dana yang dihimpun itu berasal dari zakat, shadaqah, dan infaq. Disamping itu BMT juga merupakan lembaga keuangan yang bersifat *profit motive*, karena BMT juga melakukan kegiatan yang berkenaan dengan jasa keuangan dan sektor rill.

Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut merupakan jawaban sebagai respon positif berkembang pesatnya lembaga-lembaga keuangan mikro non bank dengan berbasis syariah. Dengan BMT, diharapkan dapat terhimpun potensi ekonomi umatsehingga BMT diharapkan kedepan mampu bertindak sebagai mediator sekaligus motivator bagi pertumbuhan usaha-

³Sofiyannurriyanti, Penerapan Model Strategi Bisnis Pada Koperasi Syariah Volume 18 No.01, (Gresik: Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin Gresik, 2017), h.4.

usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai basis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Dalam peraturannya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi meliputi : Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.⁵

Dari wawancara awal dan melihat langsung laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya dalam penyusunan laporan keuangan ditemukan beberapa permasalahan yakni, didalam laporan neraca tidak terdapat Dana Syirkah Temporer. Sementara itu, berdasarkan penerapan PSAK 101 menyatakan bahwa dalam neraca terdiri dari Aset = Kewajiban + Ekuitas + Dana Syirkah Temporer. Adapun permasalahan berikutnya yang berkaitan tentang laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut ialah tidak membuat Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat. Dan juga, tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan.

Dalam rangka penyusunan penelitian ini maka, penelitian relevan atau penelitian terdahulu sangat penting digunakan sebagai dasar pijakan, dan selain untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti mengutip hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang terkait dengan penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru” penelitian oleh R.Sanjaya Silalahi yang menganalisis penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru.

⁴ Wawancara dengan ketua pengurus yaitu Bapak Yusman, S.Ag, MA: *Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut*. (Medan: 14 Mei 2018).

⁵ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, <http://ekon.go.id>: *Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*. (Diunduh pada Tanggal 08 Agustus 2018), Pasal IV.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru dalam akuntabilitasnya hanya menyajikan Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi. Persamaan antara peneliti dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh R. Sanjaya Silalahi adalah terletak pada subjek penelitian yakni laporan keuangan dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana R.Sanjaya Silalahi mengambil objek penelitian bertempat di Koperasi Syariah BMT Al-ITIHAD Rumbai Pekanbaru. Sementara, peneliti mengambil objek penelitian bertempat di Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut.

Berdasarkan masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi objek penelitian skripsi. Adanya fenomena bahwa laporan keuangan yang disusun oleh entitas tidak sepenuhnya berdasarkan standar dan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya. Jika laporan keuangan yang disusun tidak berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku maka akan dipertanyakan tingkat keandalan dan relevansinya serta akan menyesatkan bagi para pengguna. Terlebih bahwa akuntansi syariah merupakan produk yang masih cukup baru bila dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Dengan demikian pemahaman masyarakat tentang akuntansi syariah masih terlalu minim jika dibandingkan dengan pemahaman mengenai akuntansi konvensional. Melihat situasi demikian, maka penelitian ini akan membahas tentang *“Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Syari’ah BMT Masyarakat Madani Sumut)”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa dalam neraca terdiri dari
$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas} + \text{Dana Syirkah Temporer},$$
 sedangkan

didalam neraca Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, tidak terdapat Dana Syirkah Temporer.

2. Berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan Laporan Keuangan syariah, harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, sedangkan pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Masyarakat Madani Sumut tidak membuat Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat tetapi memasukkan Zakat, Infaq, Shadaqah ke dalam Laporan Neraca.
3. Berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan Laporan Keuangan syariah, harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, sedangkan pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Masyarakat Madani Sumut tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Syari’ah BMT Masyarakat Madani Sumut ?”

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Syari’ah BMT Masyarakat Madani Sumut.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan penempatan unsur-unsur atau elemen-elemen data keuangan ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data keuangan dapat tersaji dengan

baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak serta agar dapat menambah pemahaman tentang penyajian Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK 101. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pembuatan Laporan Keuangan, menyempurnakan dan menambah keyakinan untuk penyusunan Laporan Keuangan.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana penerapan akuntansi khususnya pembuatan laporan keuangan yang diperoleh selama kuliah, dan mengetahui kondisi nyata dalam tata cara pembuatan dan penyusunan Laporan Keuangan.

c. Bagi pembaca atau pihak lainnya: dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Keuangan Konvensional

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis (*business language*). Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. Transaksi adalah kejadian dalam entitas yang mempengaruhi posisi keuangan, sehingga fokus akuntansi pada informasi keuangan. Informasi yang tidak terkait dengan posisi keuangan tidak dicatat seperti misalnya penggantian direksi, penambahan proses jumlah produksi, pengangkatan karyawan baru dan perolehan kerja sama bisnis pihak lain. Namun konsekuensi dari kejadian tersebut yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan akan dicatat, akibat penambahan karyawan maka akan dikeluarkan biaya gaji yang lebih besar, akuntansi hanya akan mencatat kejadian pembayaran gaji, bukan penerimaan karyawannya.⁶

Akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis tetapi semua entitas memerlukan akuntansi, karena setiap entitas perlu untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerjanya dari aspek keuangan. Entitas pemerintah memerlukan akuntansi untuk memberikan informasi kepada masyarakat kekayaan pemerintah serta akuntabilitas keuangan suatu unit pemerintahan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) membutuhkan akuntabilitas untuk melaporkan hasil kerja dan kondisi keuangan LSM tersebut kepada para penyandang dana dan pemangku kepentingan lainnya.

Kieso⁶ mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang

⁶Dwi Martani, *et al.* *Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.8.

bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas”.⁷ Sebagai sistem, akuntansi terdiri atas input yaitu transaksi, proses yaitu kegiatan untuk merangkum transaksi, dan output berupa laporan keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas, pengertian akuntansi terdiri atas empat hal penting, adalah sebagai berikut:⁸

1. Input (masukan) akuntansi adalah transaksi yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan.
2. Proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan.
3. Output (keluaran) akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan.
4. Penggunaan informasi keuangan adalah pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi disebut laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditujukan kepada pihak eksternal, merupakan bagian dari akuntansi keuangan.

Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusunan laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusunan maupun pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

berdasarkan data informasi yang telah terjadi sehingga lebih berorientasi pada data historis.

Laporan keuangan dapat juga disusun untuk tujuan khusus misalnya laporan keuangan yang ditujukan untuk perpajakan, regulator lain seperti Bank Indonesia (untuk perusahaan bank), departemen keuangan (untuk perusahaan lembaga keuangan nonbank) maupun untuk tujuan manajemen. Laporan keuangan untuk tujuan khusus mengikuti aturan spesifik dari regulator atau sesuai dengan kebutuhan khusus pemakainya. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi yang dihasilkan dalam akuntansi disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles- GAAP*), salah satu bentuk prinsip akuntansi yang berlaku umum dan saat ini digunakan di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK 1 adalah sebagai berikut:⁹

1. Laporan Posisi Keuangan adalah daftar yang sistematis dari aset, utang, dan modal pada tanggal tertentu, yang biasanya dibuat pada akhir tahun. Disebut sebagai daftar yang sistematis, karena disusun berdasarkan urutan tertentu. Dalam Laporan Posisi Keuangan dapat diketahui berapa jumlah kekayaan entitas, kemampuan entitas memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Selain itu juga dapat diperoleh informasi tentang jumlah utang entitas kepada kreditor dan jumlah investasi pemilik yang ada didalam entitas tersebut.
2. Laporan Laba Rugi Komprehensif adalah ikhtisar mengenai pendapatan dan beban suatu entitas untuk periode tertentu, sehingga dapat diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami.

⁹Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan 01*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017).

3. Laporan Arus Kas, dengan adanya laporan ini, pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aset neto entitas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dimasa mendatang.
4. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu, bisa satu bulan atau satu tahun. Melalui laporan perubahan modal, pembaca laporan dapat mengetahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu.
5. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam empat laporan diatas. Laporan ini memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

B. Akuntansi Keuangan Syariah

1. Pengertian Akuntansi Keuangan Syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas dalam hidupnya di dunia.

Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut *Muhasabah* yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhabasah*, atau wazan yang lain adalah *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, artinya menimbang memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata *hisab* banyak ditemukan dalam Al-Quran dengan pengertian yang

hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah swt: dalam QS.Al-Isra'(17):12.

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas”.

QS.Al-thalaq(65):8

“Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan”.

QS.Al-Insyiqah(84):8

“Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah”.

Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan *accountable*. Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data financial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang

tidak terhindarkan alam islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.¹⁰

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik. Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebajikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga (3) sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya,
- b. Tegaknya keadilan didalam masyarakat,
- c. Tercapainya masalah (puncak sasaran): Selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.

Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: (1) membantu mencapai keadilan sosio ekonomi (*AlFalah*) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi

¹⁰Saparuddin Siregar, *et al*, *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi*, (Medan: Madenatera, 2016), h.12-13.

yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah.¹¹

2. Paradigma Transaksi Keuangan Syariah

Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan *ilahi*) dan sarana kebahagiaan hidup bagiseluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spritual (*al-falah*). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *illahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

3. Asas Transaksi Keuangan Syariah

Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:¹²

- a. Persaudaraan (*ukhuwah*). Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan, beraliansi (*tahaluf*).
- b. Keadilan (*'adalah*) berarti menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya, Implementasi keadilan

¹¹*Ibid*, h.13-14.

¹²Rijal Yahya, et al. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kotemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.81-82.

dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

- 1) Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadhli*). Setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti murabahah tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.
 - 2) Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan). Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya.
 - 3) Maysir adalah setiap transaksi yang bersifat spekuatif dan tidak berkaitan dengan produktifitas serta bersifat perjudian (*gambling*).
 - 4) Gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksa akad.
- c. Kemaslahatan (*mashlahah*) merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi *duniawi* dan *ukhrawi*, material dan spritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. Keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan aspek material dan spritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil,

bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

- e. Universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

4. Karakteristik Transaksi Keuangan Syariah

Implementasi transaksi syariah yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:¹³

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur riba.
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman.
- f. Tidak mengandung maysir.
- g. Tidak mengandung unsur gharar.
- h. Tidak mengandung unsur haram.
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*).

¹³*Ibid*, Siregar, Akuntansi Syariah, h.80.

- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak pihak lain.
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihktikar*).

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101

1. Pengertian PSAK 101

PSAK 101 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan syariah di Indonesia. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang terkait. Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.

Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan

Akuntansi Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian Laporan Keuangan Syariah, struktur laporan keuangan syariah, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan syariah.¹⁴

2. Kerangka Dasar

Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan diantara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan.

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Adapun yang termasuk dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah adalah:¹⁵

a. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang

¹⁴Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan SyariahPSAK 101*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017).

¹⁵Siregar, *Akuntansi Syariah*. h.76-81.

bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik; keputusan ini mungkin mencakup misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- 1) Aset;
- 2) Liabilitas;
- 3) Dana syirkah temporer;
- 4) Ekuitas;
- 5) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- 6) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- 7) Arus kas;
- 8) Dana zakat; dan
- 9) Dana kebajikan;

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.¹⁶ Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

- a. Meningkatkan kepatuan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.

¹⁶Arfan Ikhsan, et al, *Analisa Laporan Keuangan*, (Medan: Madenatera, 2016), h.4.

- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal pemilik dana *syirkahtemporer*; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagaimana besar memadai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

b. Komponen Laporan Keuangan

Dalam paragraf 10 PSAK 101 mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:¹⁷

- 1) Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode;

Laporan ini memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan laporan posisi keuangan, pemakai laporan keuangan akan dapat (1) menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi (2) menilai struktur pendanaan perusahaan (3) menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, dan (4) mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai

¹⁷Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017), Paragraf 10.

perusahaan. Pada format laporan posisi keuangan pada akhir periode untuk lembaga keuangan syariah dapat dilihat seperti berikut ini:

Tabel 1.1
BANK SYARIAH ABC
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 20X1

ASET			
Kas		xx	
Penempatan Pada Bank Indonesia		xx	
Penempatan Pada Bank Lain		xx	
Investasi Surat Berharga		xx	
Piutang:		xx	
Murabahah	xx		
Istishna	xx		
Ijarah	xx		
Salam	xx		
Pembiayaan:		xx	
Mudharabah		xx	
Musyarakah		xx	
Tagihan akseptasi		xx	
Persediaan		xx	
Aset ijarah		xx	
Aset Istishna dalam penyelesaian		xx	
Piutang Salam		xx	
Investasi pada entitas lain		xx	
Aset tetap		xx	
Aset lainnya		xx	
Jumlah Aset			xx

LIABILITAS			
Liabilitas segera		XX	
Bagi hasil yang belum dibagikan		XX	
Simpanan		XX	
Simpanan bank lain		XX	
Utang:		XX	
Salam	XX		
Istisna'	XX		
Liabilitas kepada bank lain		XX	
Pembiayaan yang diterima		XX	
Utang Pajak		XX	
Pinjaman yang diterima		XX	
Pinjaman subordinasi		XX	
Jumlah Liabilitas			XX
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Dana syirkah temporer dari bukan bank:		XX	
Tabungan Mudharabah	XX		
Deposito mudharabah	XX		
Dana syirkah Temporer dari bank:		XX	
Tabungan Mudharabah	XX		
Deposito mudharabah	XX		
Musyarakah		XX	
Jumlah Dana Syirkah Temporer			XX
EKUITAS			
Modal disetor		XX	
Tambahan modal disetor		XX	
Saldo laba (rugi)		XX	
Jumlah Ekuitas			XX

Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas			xx

2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain selama periode;

Laporan ini memberikan tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba yaitu selisih antara semua penghasilan dan semua biaya diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut. Pada format Laporan Laba Rugi untuk lembaga keuangan syariah dapat dilihat seperti berikut ini :

Tabel 1.2

BANK SYARIAH ABC

LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 201X

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB			
Pendapatan dari jual beli:	xx	xx	
Pendapatan margin murabahah	xx		
Pendapatan bersih salam parallel	xx		
Pendapatan bersih istishna parallel			
Pendapatan dari sewa:	xx	xx	
Pendapatan bersih ijarah			
Pendapatan dari bagi hasil	xx	xx	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xx		
Pendapatan bagi hasil musyarakah			
Pendapatan usaha utama lainnya		xx	
Jumlah Pendapatan Pengelola Dana Sebagai Mudharib			xx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil		(xx)	
Hak bagi hasil milik bank			xx
Pendapatan usaha Lainnya			
Pendapatan imbalan jasa perbankan		xx	
Pendapatan imbalan investasi terikat		xx	
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya			xx
BEBAN USAHA			
Beban kepegawaian		(xx)	
Beban administrasi		(xx)	
Beban penyusutan dan amortisasi		(xx)	
Beban usaha lain		(xx)	
Jumlah Beban Usaha			(xx)
LABA USAHA			xx
PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA			
Penghasilan nonusaha		xx	
Beban nonusaha		(xx)	
Jumlah Pendapatan dan Beban Nonusaha			xx
LABA SEBELUM PAJAK			xx
Beban pajak penghasilan		xx	
Laba (rugi) Bersih Periode Berjalan			xx

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

- a) Total penghasilan komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- b) Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;
- c) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
 - (1) Laba Rugi
 - (2) Penghasilan Komprehensif Lain; dan
 - (3) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang kendalian.

4) Laporan Arus Kas selama periode;

Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Pada format Laporan Arus Kas untuk lembaga keuangan syariah dapat dilihat seperti berikut ini :

Tabel 1.3
BANK SYARIAH ABC
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 201X

Arus kas dari Aktivitas Operasi:			
<i>Penyesuaian terhadap laba/rugi bersih menjadi kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi</i>			
Penyusunan aktiva tetap		xx	
Penyisihan penghapusan atas:		xx	
Giro pada bank lain	xx		
Penempatan pada bank lain	xx		
Pembiayaan yang diberikan	xx		
Penyertaan	xx		
Aktiva lain-lain	xx		
Pajak yang ditangguhkan		xx	
Zakat yang dibayarkan		xx	
Rugi/Laba dari penjualan aktiva tetap		xx	
<i>Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:</i>			
Kenaikan/penurunan penempatan pada bank lain		xx	
Kenaikan/penurunan pada surat-surat berharga		xx	
Kenaikan/penurunan pembiayaan yang diberikan		xx	
Kenaikan/penurunan aktiva lain-lain			
Kenaikan/penurunan simpanan			
<i>Wadiah</i>		xx	
<i>Mudharabah</i>		xx	
Kenaikan/penurunan hutang pajak		xx	

Kenaikan/penurunan kewajiban lainnya		xx	
Kas bersih dari aktivasi operasi			xx
Arus kas dari aktivasi investasi:			
Penjualan aktiva tetap yang disewakan		xx	
Pembelian aktiva tetap untuk disewakan		xx	
Penjualan aktiva tetap yang disewakan		xx	
Investasi pada surat berharga		xx	
Kenaikan/penurunan pada mudharabah/ musyarakah		xx	
Penjualan persediaan		xx	
Penjualan istishna'		xx	
Kenaikan/penurunan bersih pada piutang		xx	
Kas bersih dari aktivasi investasi			xx
Arus kas dari aktivasi pendanaan:			
Penerimaan modal pinjaman		xx	
Penerbitan saham		xx	
Setoran modal		xx	
Agio saham		xx	
Pembayaran deviden		xx	
Kas bersih dari aktivasi pendanaan			xx
Kenaikan/penurunan kas dan setara kas			xx
Kas dan setara kas awal tahun			xx
Kas dan setara kas akhir tahun			xx

5) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat selama periode;

Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul maal. Penyaluran dana zakat bisa dilakukan oleh entitas syariah

atau melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bentuk laporan sumber dan penggunaa dana zakat untuk lembaga syariah seperti berikut ini:

Tabel 1.4

BANK SYARIAH ABC

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

Periode yang berakhir pada 31 Desember 201X

SUMBER DANA ZAKAT			
Zakat dari internal bank syariah		xx	
Zakat dari eksternal bank syariah		xx	
Jumlah Sumber Dana Zakat			xx
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT			(xx)
KENAIKAN			xx
SALDO AWAL			xx
SALDO AKHIR			xx

6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan selama periode;

Laporan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas syariah seperti *Infaq*, *Shadaqah*, dan hasil pengelolaan dana *Waqaf*. Bentuk laporan sumber dan penggunaa dana kebajikan untuk lembaga syariah seperti berikut ini:

Tabel 1.5
BANK SYARIAH ABC
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
KEBAJIKAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 201X

SUMBER DANA KEBAJIKAN			
Infaq dari bank syariah	xx		
Sedekah	xx		
Hasil pengelolaan wakaf	xx		
Pengambilan dana kebajikan produktif	xx		
Denda	xx		
Pendapatan nonhalal	xx		
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		xx	
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			
Dana kebajikan produktif	(xx)		
Sumbangan	(xx)		
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xx)		
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		(xx)	
KENAIKAN		(xx)	
SALDO AWAL		(xx)	
SALDO AKHIR		(xx)	

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Asumsi Dasar

Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Basis akrual merupakan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, berdasarkan konsep akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya (bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan). Konsep akrual lebih mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi, berdasarkan asumsi ini, entitas tidak hanya mengakui kas yang diterima tetapi juga mengakui klaim kepada pihak lain (piutang), liabilitas kepada pihak lain, dan mengakui aset selain kas.¹⁸

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan diterapkan untuk informasi keuangan yang tersedia dalam laporan keuangan, dan juga informasi keuangan yang tersedia dengan cara lainnya. Agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan dapat merepresentasikan secara tepat apa yang akan dipresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut dapat dibandingkan (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan dapat dipahami (*understandable*).

¹⁸Martani, *Akuntansi Keuangan Menengah*, h. 36-37.

Karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan dibagi ke dalam dua bahagian, yakni karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat.¹⁹

1) Karakteristik kualitatif fundamental

Karakteristik kualitatif fundamental meliputi relevansi dan representasi tepat.

a) Relevan

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori dan atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome*) masa depan. Sedangkan informasi keuangan dikatakan memiliki nilai konfirmatori, jika menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi sebelumnya.

b) Representasi Tepat

Laporan keuangan mempresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain mempresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus mempresentasikan secara tepat fenomena yang akan dipresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Sebuah penjabaran lengkap mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Sebuah penjabaran yang netral adalah tanpa bias dalam pemilihan dan penyajian informasi keuangan.

¹⁹Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah: *Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017).

Penjabaran netral tidak diarahkan, tidak dibobotkan dan tidak ditekankan untuk memanipulasi data untuk meningkatkan kemungkinan bahwa informasi keuangan akan lebih diterima oleh pengguna. Sedangkan representasi tepat tidak berarti akurat dalam segala hal. Bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya.

c) Karakteristik kualitatif peningkat

Karakteristik kualitatif peningkat adalah karakteristik kualitatif yang berfungsi untuk meningkatkan kegunaan informasi yang relevan, dan dipresentasikan secara tepat. Karakteristik ini meliputi keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan dan keterpahaman.

(1)Keterbandingan

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya, keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos melainkan sebuah perbandingan yang mensyaratkan paling tidak dua pos.

(2)Keterverifikasian

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan pengetahuan yang berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun kerap kali tidak mencapai kesepakatan bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat.

a) Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka.

b) Keterpahaman

Pengklasifikasian, pengkarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat mempermudah pengguna dalam memahami informasi keuangan.

e. Pengakuan Unsur-unsur Laporan Keuangan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan dan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan unsur laporan keuangan. Pos yang memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos tersebut tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan. Pos yang memenuhi definisi unsur diakui jika:²⁰

- 1) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomik masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari entitas.
- 2) Pos tersebut mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal.

Adapun kriteria pengakuan unsur-unsur laporan keuangan adalah:

a) Probabilitas manfaat ekonomik masa depan

Konsep probailitas digunakan dalam kriteria pengakuan yang mengacu pada derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir kepada atau dari entitas.

b) Keandalan pengukuran

²⁰Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan: PSAK 01*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017).

Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi, penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi keandalannya.

Berikut ini akan dijelaskan pengakuan unsur-unsur laporan keuangan:

a. Pengakuan Aset

Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan aset lain, yang haknya didapat oleh bank syariah sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Untuk bisa digambarkan sebuah aset pada pernyataan posisi keuangan bank Islam, aset itu harus memiliki karakter tambahan berikut:

- 1) Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.
- 2) Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain.
- 3) Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunakan, atau mengelola aset itu.

b. Pengakuan Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain dimasa depan sebagai hasil transaksi atau peristiwa di masa lalu. Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah liabilitas pada pernyataan posisi keuangan bank syariah, liabilitas itu harus memiliki karakter tambahan berikut:

- 1) Bank syariah harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban bank syariah tidak boleh saling bergantung (*reciprocal*) dengan kewajiban pihak kepada bank.
- 2) Kewajiban bank syariah harus bisa diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.
- 3) Kewajiban bank syariah harus bisa dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih aset bank syariah kepada pihak lain, meneruskan kepada pihak lain akan penggunaan aset bank Islam untuk suatu periode, atau menyediakan jasa pihak lain.

c. Pengakuan Porsi Pemegang Rekening Investasi tak Terbatas

Rekening investasi tak terbatas merujuk kepada dana-dana yang diterima bank syariah dari individu-individu atau lainnya dengan dasar bahwa bank syariah akan memiliki hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana-dana itu tanpa pembatasan. Bank syariah dengan demikian juga berhak mencampurkan dana yang di investasikan itu dengan modalnya sendiri. Keuntungan atau kerugian suatu investasi usaha dibagi secara proposional setelah bank Islam menerima bagian keuntungan/kerugian sebagai *mudharib*.

d. Pengakuan Saham Pemilik

Saham pemilik merujuk kepada jumlah yang tersisa pada tanggal pernyataan posisi keuangan dari aset bank syariah sesudah dikurangi kewajiban, porsi pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya, serta pendapatan yang dilarang (non-halal), jika ada. Itu sebabnya pemilik terkadang dirujuk sebagai "*the owner residual interest*".

e. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari

investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.

f. Pengakuan Biaya

Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas, termasuk pemberian jasa.

f. Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah:²¹

1) Biaya historis

Biaya historis (*historical cost*) adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi.

2) Biaya kini

Biaya kini (*current cost*) adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran.

3) Nilai realisasi/penyelesaian

Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*) adalah hasil yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*).

4) Nilai kini

Nilai kini (*present value*) adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

²¹Martani, *Akuntansi Keuangan Menengah*, h. 47.

Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis yang biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran lainnya. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*lower of cost or net realizable value*), dan investasi jangka pendek dalam surat berharga dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

g. Pengungkapan dalam Akuntansi Bank Syariah

Sebelumnya laporan keuangan bank syariah yang digambarkan pada subbab sebelumnya mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:²²

- 1) Karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan.
- 2) Peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank Syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik.
- 3) Tanggungjawab bank terhadap pengelolaan zakat

Laporan keuangan bank Syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada kebijakan akuntansi:

- a) Mengenai pemilihan metode akuntansi di antara beberapa alternatif metode akuntansi yang diperbolehkan dalam setiap jenis transaksi.
- b) Yang tidak konsisten dengan konsep akuntansi keuangan bank Syariah, jika ada.
- c) Mengenai pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam setiap jenis transaksi.

²²Muhammad, *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPPN, 2013), h.248.

- d) Mengenai pengakuan dan penentuan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif bank syariah dan
- e) Konsolidasi laporan keuangan, jika ada.

Laporan keuangan bank Syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu, juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai pengelola dana maupun bank sebagai agen investasi. Pengungkapan tersebut meliputi:

- (1) Metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan.
- (2) Tingkat pengembalian, dan
- (3) Nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-masing dana investasi.

Bank Syariah harus mengungkapkan hal-hal berikut:²³

- (a) Jenis aktiva produktif, sektor ekonomi, dan jumlah aktiva produktif masing-masing.
- (b) Jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- (c) Kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai.
- (d) Jumlah aktiva produktif yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang aktiva produktif yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
- (e) Klasifikasi aktiva produktif menurut jangka waktu, kualitas aktiva produktif, valuta, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
- (f) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang

²³*Ibid*, muhammad, h.249-250.

menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dan saldo penyisihan pada akhir tahun.

- (g) Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan aktiva produktif bermasalah.
- (h) Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum.
- (i) Kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan pengendalian risiko portopolio aktiva produktif.
- (j) Besarnya aktiva produktif bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi, dan
- (k) Saldo aktiva produktif yang sudah dihentikan.

D. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia²⁴

Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi mempunyai dua kebijakan umum, diantara kebijakan tersebut ialah:

a. Menimbang

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka perlu menyusun pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

²⁴Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha dan Menengah Republik Indonesia. <https://ekon.go.id:Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi>. Diunduh pada tanggal 08 agustus 2018.

b. Menetapkan/Memutuskan

Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Pasal 1

Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi terdiri dari:

- 1) Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
- 2) Kebijakan Akuntansi Keuangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi.

Pasal 3

Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi meliputi;

- 1) Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum);
- 2) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
- 3) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah).

Pasal IV

Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan panduan bagi koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Indonesia dan pejabat yang berwenang di pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan para pihak yang berkepentingan.

Pedoman akuntansi ini mengatur tentang penyusunan pelaporan keuangan kegiatan usaha yang meliputi:

- 1) Neraca;
- 2) Perhitungan Hasil Usaha;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Laporan Arus Kas;
- 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (infaq/sedekah dan wakaf);
- 7) Catatan atas laporan keuangan.

Panduan yang digunakan dalam menyusun pedoman ini adalah:

- 1) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah;
- 2) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
- 3) Standar Akuntansi Keuangan lainnya yang berlaku dan sesuai perkoperasian;
- 4) Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Dengan diterbitkannya pedoman ini maka Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi di Indonesia mempunyai acuan yang baku dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang benar. Berikut adalah ilustrasi penyajian laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

a) Neraca;

Tabel 2.1
KSPPS “ABC”
NERACA

Periode, 31 Desember 20XX

ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	XX
Bank Syariah/KSPPS lainnya	XX
Surat Berharga	XX
Piutang	XX
Murabahah	XX
Salam	XX
Istishna	XX
Ijarah	XX
(pendapatan margin yang ditangguhkan)	(XX)
Pembiayaan yang diberikan	
Pembiayaan Mudharabah	XX
Pembiayaan Musyarakah	XX
PPAP	(XX)
Persediaan / Aset Murabahah	XX
Aset Ijarah	XX
Aset Istishna Dalam Penyelesaian	XX
Qard	XX
Piutang lain-lain	XX
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	XX
<i>Jumlah Aset Lancar</i>	XX
ASET TIDAK LANCAR	
Penyertaan pada Entitas lain	

Properti Investasi	
Akumulasi Penyusutan Properti	xx
Investasi	(xx)
Aset tetap	
Tanah	xx
Bangunan	xx
Kendaraan	xx
<i>(Akumulasi Penyusutan)</i>	xx
<i>Jumlah Aset Tidak Lancar</i>	(xx)
JUMLAH ASET	xx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Tabungan Wadiah	xx
Simpanan Mudharabah	xx
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	xx
Kewajiban jangka pendek lainnya	xx
Hutang Pajak	xx
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>	xx
	xx
<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	xx
Simpanan Mudharabah Berjangka	<u>xx</u>
Pembiayaan yang Diterima	<u>xx</u>
Modal Penyertaan	xx
Kewajiban lain-lain	xx
<i>Jumlah Hutang Jangka Panjang</i>	xx
<i>Titipan Ziswaf</i>	xx
<i>Jumlah Kewajiban</i>	xx

EKUITAS	
Modal Disetor	<u>XX</u>
Modal Tambhan	XX
Cadangan	XX
Hibah	XX
Modal Penyertaan	XX
Modal Lainnya	XX
SHU tahun Berjalan	XX
<i>Jumlah Ekuitas</i>	XX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XX

b) Laporan Perhitungan Hasil Usaha;

Tabel 2.2

KSPPS “ABC”

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Periode 1 Januari-31 Desember 20xx

Pendapatan Operasional Utama	
Pendapatan Margin Murabahah	XX
Pendapatan Salam	XX
Pendapatan Istishna	XX
Pendapatan Ijarah	<u>XX</u>
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	XX
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	XX
Pendapatan Administrasi	XX
Pendapatan Operasional Lainnya	
<i>Jumlah Pendapatan Operasional</i>	XX
Hak Bagi hasil Amggota Penyimpan	XX
Pendapatan Non Operasional	XX
Biaya Operasional	XX
Biaya Tenaga Kerja	XX
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	XX
Biaya Promosi	XX

Biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	xx
Biaya Penyusutan Aset Tetap	<u>xx</u>
Biaya Amortisasi	
Biaya Administrasi	<u>xx</u>
Biaya Kantor	
Biaya Perkoperasian	xx
Biaya Lainnya	xx
<i>Jumlah Biaya Operasional</i>	<u>(xx)</u>
<i>Pendapatan Bersih Operasional</i>	xx
Biaya Non Operasional	
SHU	

c) Laporan Perubahan Ekuitas;

Tabel 2.3
KSPPS “ABC”
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 20xx

	20x1	20x2
Saldo per 1 Januari	xx	xx
Modal Awal Tahun	xx	xx
Ditambah (+)		
Simpanan Pokok	xx	xx
Simpanan Wajib	xx	xx
Modal Penyertaan	xx	xx
Modal Lainnya	xx	xx
SHU	<u>xx</u>	<u>xx</u>
<i>Jumlah Tambahan</i>	xx	xx
Dikurangi (-)		
Simpanan Pokok	xx	xx

Simpanan Wajib	XX	XX
Cadangan	XX	XX
Hibah	XX	XX
Modal Penyertaan	XX	XX
Modal Lainnya	XX	XX
SHU	<u>XX</u>	<u>XX</u>
<i>Jumlah Pengurangan</i>	XX	XX
Saldo per 31 Desember	XX	XX

d) Laporan Arus Kas;

Tabel 2.4
KSPPS “ABC”
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 20xx

Penerimaan	
Penempatan pada Bank	XX
Angsuran pembiayaan (mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah)	XX
Pembiayaan Bank dan Pihak Lainnya	XX
Simpanan Pokok	XX
Simpanan Wajib	XX
Cadangan	XX
Hibah	XX
Modal Penyertaan	XX
Modal Lainnya	XX
Pendapatan Operasional	XX
Pendapatan Operasional Lainnya	XX
Penerimaan Lainnya	<u>XX</u>
<i>Jumlah Penerimaan</i>	XX

Pengeluaran	
Penempatan Pada Bank	XX
Pembiayaan (mudharabah, ijarah, murabahah, musyarakah, qardh)	XX
Angsuran pembiayaan Bank dan Pihak Lainnya	XX
Puitang lain-lain	XX
Biaya Operasional	XX
Biaya Operasional Lainnya	XX
Pembayaran SHU	<u>XX</u>
Pengeluaran Lainnya	XX
<i>Jumlah Pengeluaran</i>	XX
<i>Mutasi kas</i>	XX
<i>Kas awal tahun</i>	<u>XX</u>
<i>Kas akhir tahun</i>	XX

e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;

Tabel 2.5
KSPPS “ABC”
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
ZAKAT
Per 31 Desember 20xx

Sumber dana zakat awal periode	XX
Sumber dana zakat	
Zakat KSPPS	XX
Zakat dari Pihak Luar	XX
<i>Jumlah Penerimaan</i>	<u>XX</u>
Penggunaan dana zakat	XX

Disalurkan ke lembaga lain	XX
Badan lainnya	XX
<i>Jumlah Penggunaan</i>	<u>XX</u>
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan	XX
Sumber Dana Zakat Pada Akhir Periode	XX

f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;

Tabel 2.6

KSPPS “ABC”

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

KEBAJIKAN

Per 31 Desember 20xx

Sumber Dana Kebajikan Awal Periode	XX
Sumber Dana Kebajikan	
Dana Kebajikan dari KSPPS	XX
Dana Kebajikan dari Pihak Luar	<u>XX</u>
<i>Jumlah Penerimaan</i>	XX
Penggunaan Dana Kebajikan	
Disalurkan ke Lembaga Lain	
Badan Lainnya	<u>XX</u>
<i>Jumlah Penggunaan</i>	XX
Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaan	XX
Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	XX

E. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu atau penelitian relevan penting digunakan sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, dan selain untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti mengutip hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang terkait dengan penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru

Penelitian Oleh R. Sanjaya Silalahi yang menganalisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru. Penelitian ini bersifat komperatif yang membandingkan penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru. Data didapatkan melalui penelusuran dokumentasi Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru dalam akuntabilitasnya hanya menyajikan laporan neraca dan laporan laba rugi. Persamaan penelitian R Sanjaya Silalahi adalah terletak pada subjek penelitian yakni Laporan Keuangan dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian dimana penelitian R Sanjaya Silalahi bertempat di Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai.²⁵

2. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 Revisi Tahun 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah

²⁵R. Sanjaya Silalahi, Skripsi: *Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT AL ITTIHAD Rumbai Pekanbaru* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2012), h.66.

Penelitian Oleh Brian Aderianda Bahri yang menganalisis Penerapan PSAK 101 pada Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga. Penelitian ini bersifat komperatif yang membandingkan penerapan PSAK 101 pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga. Data yang didapatkan melalui penelusuran dokumentasi Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya PT Asuransi Takaful Keluarga bisa dikatakan telah menerapkan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah yakni terdapatnya Laporan Laba Rugi Komprehensif dan telah berubahnya Laporan Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan. Persamaan Penelitian Oleh Brian Aderianda Bahri adalah terletak pada subjek penelitian yakni Laporan Keuangan, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian dimana penelitian oleh Brian Aderianda Bahri bertempat di PT Asuransi Takaful Keluarga.²⁶

²⁶Brian Aderianda Bahri, Skripsi: *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO.101 Revisi Tahun 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.79.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana yang terstruktur dari penyelidikan yang digambarkan untuk memperoleh jawaban tentang pertanyaan penelitian. Pada pengertian luas, desain penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perancangan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan dalam arti sempit dan khusus, desain penelitian adalah prosedur pengumpulan dan analisis data, yang dalam artian menjelaskan metode pengumpulan data dan metode analisis apa saja yang digunakan untuk menjelaskan penelitian.²⁷

Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Metode deskriptif yang diterapkan dalam masalah ekonomi Islam mempunyai beberapa kriteria pokok, yang dapat dibagi atas kriteria umum dan khusus. Kriteria tersebut sebagai berikut:²⁸

a. Kriteria umum

- 1) Masalah yang dirumuskan layak diteliti, memiliki nilai ilmiah, serta tidak terlalu luas.
- 2) Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum.
- 3) Data yang digunakan harus fakta-fakta yang tepercaya dan bukan merupakan opini.

²⁷ Arfan Ikhsan. Misri, *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 86.

²⁸ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 205.

a. Kriteria khusus

- 1) Prinsip-prinsip ataupun data yang digunakan dinyatakan dalam nilai (value).
- 2) Fakta ataupun prinsip yang digunakan adalah mengenai masalah status.
- 3) Sifat penelitian adalah *ex post facto*. Oleh karena itu, tidak ada kontrol terhadap variabel dan peneliti tidak mengadakan pengaturan atau manipulasi terhadap variabel.

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi Laporan Keuangan Koperasi Syaria'ah BMT Masyarakat Madani ini, diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan beberapa unsur yang menyangkut pelaporan keuangan Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut. Sedangkan objek penelitiannya adalah Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut.

D. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara media. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, laporan historis, majalah, dan artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dalam hal ini data

sekunder yang diambil berupa dokumen-dokumen dari perusahaan untuk mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik pengumpulan datanya sebagai berikut:

- a. Dokumentasi; teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalan data lewat studi dokumentasi menjadi pelengkap proses penelitian kualitatif. Bahkan tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada.²⁹ Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi terhadap Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut yang telah dipublikasikan, untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 101.
- b. Wawancara ; teknik wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai secara langsung Bapak Pimpinan dan Staff Keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti dan mendapatkan pemahaman yang utuh dan makna yang tepat. Berikut ini adalah daftar pertanyaan dan hasil wawancara antara pihak peneliti

²⁹Sujoko Efferin, *et al*, *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 330-331.

dengan pihak Internal Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, pada:

Hari, Tanggal : Senin, 14 Mei 2018

Tempat : Jl.Sidomulyo No.96 Dusun.XIII Desa Sei Rotan
Kec.Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Medan-
Sumatera Utara.

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1) Bergerak dalam bidang apakah koperasi ini?

Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut merupakan lembaga keuangan mikro non bank dengan berbasis syariah yang bergerak di bidang Usaha Jasa Keuangan.

2) Bagaimana awal pendirian BMT Masyarakat Madani Sumut?

BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara didirikan Pada Hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 merupakan koperasi Syariah BMT yang diinisiasi oleh Bapak Poniman dan Kawan-kawan di Sumatera Utara dan memperoleh Badan Hukum Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SK Nomor, 518.503/29BH/II/KUK/2007 pada tanggal 27 Maret dengan Akta Notaris No.108 Notaris Binsar Simanjuntak Sh.

3) Berapa hari dan berapa jam Koperasi Syariah Masyarakat Madani Sumut Beroperasi Setiap Minggunya?

Kegiatan operasional koperasi adalah setiap hari Senin hingga Sabtu. Pada hari senin hingga Jumat, jam operasional dimulai dari pukul 08.00-16.30, sedangkan pada hari Sabtu dimulai dari pukul 08.00-13.00.

4) Berapa jumlah anggota aktif yang ada di Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut?

Total keseluruhan anggota yang aktif akhir tahun 2017 adalah 600 orang.

5) Apakah Koperasi Syariah Masyarakat Madani Sumut memiliki Struktur organisasi?

Ya, sejak awal berdirinya koperasi sudah memiliki Struktur organisasi yang berpungsi sebagai pengawas dan pengurus serta pembagian tugas untuk masing masing anggota.

6) Apakah visi dan misi dari koperasi ini?

a) Visi

Menjadi sebuah Lembaga Keuangan yang mandiri, sehat, besar dan kuat serta profesional, jujur, terpercaya, amanah, akuntabel, selamat dan sejahtera.

b) Misi

Menumbuh kembangkan pengusaha mikro/kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia.

7) Apakah target yang ingin dicapai koperasi untuk kedepannya?

Target yang ingin dicapai koperasi ialah kedepannya, BMT harus mampu berkembang terutama ditandai dengan meningkatnya jumlah aset yang berasal dari peningkatan kuantitas dan kualitas tabungan.

Akan segera diluncurkan berbagai program pengembangan, terutama berkenan dengan program marketing agar terjaring sebanyak mungkin calon nasabah penabung potensial.

Untuk penyaluran pembiayaan, akan dilakukan seleksi yang ketat sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan, namun tetap memberi kemudahan akses pembiayaan bagi usaha potensial yang tidak tersentuh oleh bank (*unbankable*).

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data untuk diinterpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema, atau kategori tertentu. Langkah utama dalam analisis data adalah: (a) mengumpulkan

data, (b) memperbaiki kerangka data sehingga lebih akurat, (c) menyusun unsur-unsur data yang lemah secara empiris sehingga lebih bermakna, (d) melakukan reinterpretasi data melalui hubungan dan akurasi hubungan antar data, (e) melakukan perubahan yang mengarah pada pengumpulan data untuk mempermudah pelaksanaan penelitian.

Adapun analisis data secara sistematis dilakukan dengan tiga langkah secara bersamaan yaitu:³⁰

a. Reduksi

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan dari transformasi data besar yang muncul dari catatan-catatan tertulis.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan penyajian sekumpulan informasi sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian tersebut dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pada analisis ini akan dilakukan perbandingan apakah Laporan Keuangan Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut telah disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 101, maka penyajian akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut telah disajikan dengan benar. Namun apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 101, maka penyajian akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut belum dapat dikatakan benar, masih perlu dilakukan penyesuaian.

³⁰Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi (Muamalah)*, h. 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Pendirian Baitul Maal Wat Tanwil

BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara didirikan Pada Hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 merupakan koperasi Syariah BMT yang diinisiasi oleh Bapak Poniman dan Kawan-kawan di Sumatera Utara dan memperoleh Badan Hukum Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SK Nomor, 518.503/29BH/II/KUK/2007 pada tanggal 27 Maret dengan Akta Notaris No.108 Notaris Binsar Simanjuntak Sh.

Koperasi syariah BMT Masyarakat Madani merupakan jawaban sebagai respond positif berkembang pesatnya lembaga-lembaga keuangan mikro non bank dengan berbasis syariah. Dengan BMT, diharapkan dapat terhimpun potensi ekonomi ummat sehingga BMT diharapkan ke depan mampu bertindak sebagai mediator sekaligus motivator bagi pertumbuhan usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai basis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pengembangan usaha mikro/kecil melalui fasilitas pembiayaan untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan. BMT bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, BMT hanya memfasilitasi Firman Allah SWT “*Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubahnya*” (QS. Ar-Ra’d ayat 11).³¹

BMT atau *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan non bank yang berdasarkan syariah. Dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat luas, BMT melakukan ekonomi

³¹Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara.

umat Islam sebagai langkah menjauhkan umat dari lingkaran panjang rentenir. Melihat kondisi riil masyarakat kita dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjat rentenir. BMT terdiri dari dua bagian yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* dengan fungsinya yaitu sebagai *Baitul Maal* adalah sebagai badan amil yang menerima titipan zakat, infaq dan sadaqah untuk kemudian menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan, *Baitul Tamwil* lebih berorientasi kepada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya. Dalam praktiknya, *Baitul Tamwil* menghimpun tabungan dan titipan untuk kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dengan prosedur yang lebih gampang dan berdasarkan bagi hasil.

b. Struktur Organisasi Koperasi Syariah

Struktur organisasi merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan usaha. Jumlah anggota yang aktif akhir tahun 2017 adalah 600 orang.

Secara umum profil BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Profil BMT Masyarakat Madani Sumut

Nama	BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara
Tanggal Berdiri	27 Maret 2007
No dan tanggal Badan Hukum	518.503/ 29 BH/ II/ KUK/ 2007 pada tanggal 27 Maret 2007
Alamat Lengkap	Jln. Sidomulyo No.96 Dusun.XIII Desa Sei Rotan
Kecamatan	Percut Sei Tuan
Kabupaten/ Kota	Deli Serdang
Provinsi	Sumatera Utara

Kode Pos/ Telp.	20371 / 061-738 9517
Pengurus	
Ketua	Yusman, S.Ag, MA
Sekretaris	Sugianto, S.Pd.I
Bendahara	Dakwati, S.A
Pengawas	
Ketua	Poniman, ST
Sekretaris	Suheri
Anggota	Friyadi, SE
	Faisal Rahmad
	Cahirumni, ST
Manajer	Masdianto Purba
Accounting	Budi Mulyanto
Kasir	Atika Syahla
Marketing	Aberni Hasan

c. Logo Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut



Gambar 1.1

Sumber : BMT Masyarakat Madani Sumut³²

d. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi Koperasi Syariah

a. Rapat Anggota

- 1) Kekuasaan tertinggi.
- 2) Menetapkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan khusus.
- 3) Menetapkan kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- 4) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
- 5) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 6) Mensahkan laporan pengurus.
- 7) Mensahkan laporan pengawas.
- 8) Menetapkan pembagian SHU.

³²Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut,
<http://www.bmt.csimadaninusantara.co.id>. Diunduh pada tanggal 30 Juli 2018.

9) Keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

b. Pengurus

Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.

- 1) Bertanggungjawab kepada rapat anggota
- 2) Tidak merangkap sebagai pengawas
- 3) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita BMT, karena tindakan kesengajaan atau kelalaian.

c. Tugas Pengurus

Adapun tugas pengurus antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana pendapatan dan anggaran belanja koperasi.
- 2) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 3) Melaksanakan rencana kerja yang sudah di tetapkan rapat anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib.
- 6) Mencatat setiap transaksi anggota, memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 7) Meningkatkan pengetahuan anggota dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anggota.

d. Wewenang Pengurus

Adapun wewenang pengurus antara lain sebagai berikut:

- 1) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan.
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan.
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggungjawab dan keputusan rapat anggota.

- 4) Rencana pengangkatan pengelola sesuai persetujuan dalam rapat anggota.

e. Pengawas

Karakteristik untuk menjadi pengawas koperasi syariah BMT Masyarakat Madani Sumut sebagai berikut:

- 1) Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- 2) Bertanggungjawab kepada rapat anggota.
- 3) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- 4) Tidak merangkap sebagai pengurus.
- 5) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

f. Tugas Pengawas

Adapun tugas pengawas antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan koperasi.
- 2) Melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis dalam rapat anggota.

g. Wewenang Pengawas

Adapun wewenang pengawas antara lain sebagai berikut:

- 1) Meneliti catatan yang ada pada Koperasi Syariah BMT masyarakat Madani Sumut.
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

e. Visi dan Misi Koperasi Syariah

1) Visi

Menjadi sebuah Lembaga Keuangan yang mandiri, sehat, besar dan kuat serta profesional, jujur, terpercaya, amanah, akuntabel, selamat dan sejahtera.

2) Misi

Menumbuh kembangkan pengusaha mikro/kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan, mengurangi

kesenjangan antara si miskin dan si kaya dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia.³³

f. Produk-produk Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut

1) Produk Simpanan/Tabungan

Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut telah meluncurkan beberapa produk Simpanan/Tabungan antara lain:

- a) Tabungan Berjangka (TAJAKA) Simpanan yang hanya dapat diambil sesuai jangka waktu yang disepakati: 3,6, dan 12 bulan.
- b) Tabungan Idul Fitri (TADURI) Simpanan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil menjelang hari raya Idul Fitri.
- c) Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA) Simpanan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak. Pengambilannya biasanya digunakan untuk awal tahun ajaran baru.
- d) Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA) Simpanan biasa yang dapat diambil setiap waktu.

2) Produk Pembiayaan

Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut juga meluncurkan berbagai macam produk pembiayaan mikro bagi pengembangan usaha, antara lain:

- a) Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan yang ditujukan untuk usaha produktif anggota. Keseluruhan pembiayaan dibiayai oleh BMT, penentuan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
- b) Pembiayaan Mudharabah, Yaitu anggota perlu usaha namun belum ada dana. BMT membelikan dan menjualkan kepada anggota tersebut dengan harga dan pembiayaan jatuh tempo yang disepakati.

³³*Ibid*, BMT Masyarakat Madani Sumut.

- c) Pembiayaan Musyarakah, Yakni pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT dan anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan.
- d) Pembiayaan Ba'i Bitsamal Ajil, Yakni pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu badan usaha atau barang. BMT membelikan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati.
- e) Pembiayaan Qardul Hasan, Adalah pembiayaan yang ditujukan bila anggota berada pada situasi yang sulit dan tidak memiliki modal, lebih diutamakan untuk kegiatan sosial.

3) Badan Usaha Riil (Busriil)

Badan usaha riil adalah kegiatan usaha BMT untuk meningkatkan keuntungan dan memberikan kekuatan modal yang diperlukan untuk usaha-usaha seperti:

- a) Usaha Kedai Kelontong
- b) Warung Internet
- c) Reparasi Komputer
- d) Perbengkelan
- e) Rumah sakit
- f) Perumahan

2.Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut

a. Neraca;

Berikut ini merupakan Laporan Neraca BMT Masyarakat Madani
Sumut:

Tabel 4.1
KOPERASI SYARI'AH BMT MASYARAKAT MADANI
SUMUT
NERACA
Periode, 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

AKTIVA		
Aktiva Lancar:		
Kas	90.234.000	
Bank dan Deposito	110.560.000	
Piutang Bersih	1.075.098.000	
Biaya Dibayar Dimuka	45.890.000	
Persediaan	3.500.000	
Jumlah Aktiva Lancar		1.325.282.123
Aktiva Tetap		
Harga Perolehan	165.340.000	
Akumulasi Penyusutan	(95.670.000)	
Aktiva Tetap Lainnya	17.400.000	
Jumlah Aktiva Tetap		87.070.000
Total Aktiva		1.412.352.123
PASSIVA		
Hutang:		
Simpanan	366.228.123	
Hutang Jangka Panjang	250.780.000	
Titipan Dana Zis	30.400.000	
Jumlah Hutang		647.408.123
Modal:		

Simpanan Pokok	280.450.000	
Simpanan Wajib	215.980.000	
Simpanan Khusus	73.314.000	
Cadangan Penghapusan		
Piutang	72.560.000	
Sisa Hasil Usaha	122.640.000	
Jumlah Modal		764.944.000
Total Passiva		1.412.352.123

b. Laporan Laba Rugi;

Berikut ini merupakan Laporan Laba Rugi Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut:

Tabel 4.2

**KOPERASI SYARI'AH BMT MASYARAKAT MADANI
SUMUT**

LAPORAN LABA RUGI

Periode, 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

PENDAPATAN		
Pendapatan Operasional Utama		
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan	97.689.000	
Margin Pembiayaan	205.643.000	
Pendapatan Operasional Lainnya		
Pendapatan Jasa Simpanan	17.563.000	
Pendapatan Administrasi		
Pembiayaan	52.783.000	
Pendapatan Denda	22.529.000	

Pembiayaan		
Pendapatan Materai	2.720.000	
Jumlah Pendapatan		398.927.000
BIAYA		
Biaya Bagi Hasil Simpanan	65.345.000	
Biaya Bagi Hasil Pembiayaan Bank	48.342.000	
Biaya Gaji Karyawan	151.625.000	
Biaya Tunjangan	8.450.000	
Biaya Administrasi dan Umum	375.000	
Biaya Operasional Lainnya	2.150.000	
Jumlah Biaya		276.287.000
		122.640.000
JUMLAH LABA USAHA		

c. Laporan Arus Kas;

Berikut ini merupakan Laporan Arus Kas Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut:

Tabel 4.3

**KOPERASI SYARI'AH BMT MASYARAKAT MADANI
SUMUT**

LAPORAN ARUS KAS

Periode, 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

KAS MASUK		
Peningkatan Kewajiban		
Piutang Bersih	20.572.000	
Biaya Dibayar Dimuka	4.779.877	

Akumulasi Penyusutan	8.320.000	
Peningkatan Modal		
Hutang Jangka Panjang	15.750.874	
Simpanan Pokok	10.670.000	
Simpanan Wajib	10.980.000	
Simpanan Khusus		
Cadangan Penghapusan Piutang	12.103.000	
Sisa Hasil Usaha	9.198.153	
Jumlah Kas Masuk		92.373.877
KAS KELUAR		
Peningkatan Aktiva Lancar	12.110.000	
Bank dan Deposito	3.500.000	
Persediaan		
Peningkatan Aktiva Tetap		
Harga Perolehan	4.770.000	
Aktiva Tetap Lainnya	2.100.000	
Penurunan Kewajiban Jangka Panjang		
Simpanan	54.119.877	
Titipan Dana ZIS	5.430.000	
Jumlah Kas Keluar		82.029.877
Selisih Kas Keluar		10.344.000
Kas Tahun 2016		79.890.000
Kas Tahun 2017		90.234.000

B. Pembahasan

1. Analisis Terhadap Format Neraca

Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:³⁴

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
- b. Liabilitas merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer.

Entitas syariah menyajikan dalam laporan keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut ini:

Aset

- (1) Kas;
- (2) Penempatan pada Bank Indonesia;
- (3) Penempatan pada Bank lain;
- (4) Investasi pada surat berharga;
- (5) Piutang:
 - (a) Piutang murabahah;
 - (b) Piutang istishna;
 - (c) Piutang pendapatan ijarah;
- (6) Pembiayaan:
 - (a) Pembiayaan mudharabah;
 - (b) Pembiayaan musyarakah;

³⁴ *Ibid IAI, PSAK 101 Efektif Per 1 Januari 2017.*

- (7) Tagihan dan liabilitas akseptasi;
- (8) Persediaan;
- (9) Aset yang diperoleh untuk ijarah;
- (10) Aset istishna dalam penyelesaian;
- (11) Piutang salam;
- (12) Investasi yang dicatat dengan metode ekuitas;
- (13) Aset tetap;

Liabilitas

- (14) Liabilitas segera;
- (15) Bagi hasil yang belum dibagikan;
- (16) Simpanan:
 - (a) Giro wadiah;
 - (b) Tabungan wadiah;
- (17) Simpanan bank lain:
 - (a) Giro wadiah;
 - (b) Tabungan wadiah;
- (18) Utang salam;
- (19) Utang istishna;
- (20) Liabilitas kepada bank lain;
- (21) Pembiayaan yang diterima;
- (22) Utang pajak;
- (23) Pinjaman yang diterima;
- (24) Pinjaman subordinasi;

Ekuitas

- (25) Modal disetor;
- (26) Tambahan modal disetor
- (27) Penghasilan komprehensif lain;
- (28) Saldo laba; dan
- (29) Kepentingan non pengendali.

Jika kita bandingkan antara Laporan Neraca Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut seperti pada Tabel 4.1 dengan ilustrasi Penyajian

Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia seperti yang digambarkan pada Tabel 2.1. Disana kita dapat melihat bahwasanya dalam penyajian Neraca atau Laporan Posisi Keuangan, Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut secara keseluruhan sudah menerapkan pos-pos seperti Aset, Kewajiban, dan Ekuitas didalam laporan Neraca sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

2. Analisis Terhadap Format Laporan Laba Rugi

Jika kita bandingkan antara Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani Sumut dengan Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia khususnya pada penyajian laporan laba rugi terdapat perbedaan pemberian nama laporan, yakni antara Laporan Laba Rugi dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Perhitungan Hasil Usaha menggambarkan hasil usaha koperasi yang menjalankan prinsip syariah dalam satu periode akuntansi. Penyajian akhir dari perhitungasn hasil usaha disebut dengan SHU (Sisa Hasil Usaha). Jika kita lihat pada Tabel 4.2 BMT Masyarakat Madani Sumut belum menyesuaikan pemberian nama laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

3. Analisis Terhadap Format Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah disebutkan bahwa entitas syariah harus menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan struktur ekuitas selama satu periode. Jika kita lihat dari sisi laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, maka adanya keganjalan bahwa Laporan Perubahan Ekuitas tidak dibuat oleh Koperasi BMT Masyarakat Madani Sumut.³⁵ Dengan demikian laporan keuangan yang disusun oleh entitas syariah tersebut tidak

³⁵*Ibid*, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha dan Menengah Republik Indonesia.

sempurnya berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Laporan Perubahan Ekuitas yang seharusnya diterapkan didalam Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani Sumut.

4. Analisis Terhadap Format Laporan Arus Kas

Sesuai dengan ketentuan Laporan Arus Kas bisa disusun dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Agar menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk menilai kinerja organisasi baik untuk periode laporan ataupun mengestimasi arus kas dimasa depan.

Jika kita lihat dari Tabel 4.3 yaitu Laporan Arus Kas BMT Masyarakat Madani Sumut dan Tabel 2.4 yaitu Laporan Arus Kas menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, secara keseluruhan pos-pos yang berkaitan sudah sesuai.

5. Analisis Terhadap Format Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah disebutkan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- 1) Dana zakat berasal dari dana wajib zakat;
- 2) Dari dalam entitas syariah;
- 3) Dari pihak luar entitas syariah;
- 4) Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Kenaikan dan penurunan dana zakat;
- 6) Saldo awal dana zakat;
- 7) Saldo akhir dana zakat;

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran

zakat dilakukan oleh nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Komponen dasar laporan sumber dan penyaluran dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama satu periode, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Selain itu, kerugian aset tidak boleh ditutup dengan dana zakat.

Dalam menyajikan laporan keuangannya, BMT Masyarakat Madani Sumut tidak membuat Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat seperti yang bisa kita lihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti khususnya pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menyatakan bahwa didalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pimpinan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut setiap nasabah yang menabung tidak dikenakan biaya administrasi seperti halnya jika menabung di bank, namun setiap dana simpanan nasabah langsung dipotong untuk disalurkan ke dana zakat pada akhir bulan sebagai pengganti biaya administrasi.

6. Analisis Terhadap Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah disebutkan bahwa Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - 1) Infaq;
 - 2) Sedekah;
 - 3) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Pengembalian dana kebajikan produktif;
 - 5) Denda; dan
 - 6) Penerimaan nohalal.
- b. Penggunaan dana kebajikan untuk:
- 1) Dana kebajikan produktif;
 - 2) Sumbangan; dan
 - 3) Penggunaan lain untuk kepentingan umum.
- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
- d. Saldo awal dana kebajikan; dan
- e. Saldo akhir dana kebajikan.

Dalam menyajikan laporan keuangannya, BMT Masyarakat Madani tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, akan tetapi pada laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut terdapat pos-pos yang dapat dikategorikan sebagai dana kebajikan, seperti:

- 1) Dana Pendidikan
- 2) Dana Sosial
- 3) Dana Pembangunan Daerah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan dari kenyataan yang telah ditemui sepanjang analisa, dalam kasus ini maka dapat disimpulkan bahwasanya Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara belum mampu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 (PSAK 101). Khususnya dalam penyajian laporan posisi keuangan (neraca) yang belum mencantumkan pos Dana Syirkah Temporer, juga tidak membuat Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan yang seharusnya hal itulah menjadi pembeda antara laporan keuangan akuntansi konvensional dan akuntansi keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan dari kenyataan yang telah ditemui sepanjang analisa mengenai “ Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut)”, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. BMT Masyarakat Madani Sumut sebaiknya menyusun neraca sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, yang mana telah diuraikan Aktiva = Kewajiban + Dana Syirkah Temporer + Ekuitas. Karena jika laporan keuangan disusun tidak berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku maka akan dipertanyakan tingkat keandalan dan relevansinya serta akan menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.
2. BMT Masyarakat Madani Sumut sebaiknya Membuat Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat serta membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.
3. BMT Masyarakat Madani Sumut sebaiknya meningkatkan kualitas dan relevansinya dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga mampu memiliki kualitas daya banding yang tinggi serta untuk meningkatkan

kinerja dan transparansi pengelolaan laporan keuangan khususnya BMT Masyarakat Madani Sumut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014.
- Efferin, Sujoko. *et al. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Penyajian Laporan Keuangan Syariah 101*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017).
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan 01*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017).
- Ikhsan, Arfan. Misri. *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Medan: Citapustaka Media Perintis. 2012.
- Ikhsan, Arfan. *et al. Analisa Laporan Keuangan*. Medan: Madenatera. 2016.
- Martani, Dwi. *et al. Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Muhammad. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPPN. 2013.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Siregar Saparuddin. *et al. Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi*. Medan: Madenatera. 2016.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.

Jurnal

- Sofiyannurriyanti. *Penerapan Model Strategi Bisnis Pada Koperasi Syariah Volume 18 No. 01*. Gresik: Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin Gresik. 2017. h.4.

Skripsi

Silalahi, R.Sanjaya Skripsi: *Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT AL ITTIHAD Rumbai Pekanbaru* . Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.2012. h.66.

Bahri, Brian Aderianda. Skripsi: *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO.101 Revisi Tahun 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014. h.79.

Website

BMT Masyarakat Madani Sumut.<http://www.bmtcsimadaninusantara.co.id>: *Profil BMT Masyarakat Madani Sumut*. Diunduh pada tanggal 30 Juli 2018.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha dan Menengah Republik Indonesia.<https://ekon.go.id>:*Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*. Diunduh pada tanggal 08 Agustus 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683 – 6622925
Fax. (061) 6615683 Email : febi@iainsu.ac.id

Nomor : B-1439/EB/PP.009/07/2018

3 Juli 2018

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth,

1. **Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag**

2. **Kusmilawaty, SE, M.Ak**

Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : **Bayu Lian Surbakti**

NIM : 51143008

Jurusan : Akuntansi Syariah

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, sedang dalam menyelesaikan skripsi dengan judul:

"Analisis Penerapan PSAK 101 pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Koperasi Syariah BMT Masyarakat Mandiri Sumut)"

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara:

1. **Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag** untuk menjadi Pembimbing I, dengan tugas utama membimbing isi/materi.
2. **Kusmilawaty, SE, M.Ak** untuk menjadi Pembimbing II, dengan tugas utama membimbing metodologi.

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut untuk dikoreksi sebagaimana mestinya

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalam

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faximili (061) 6615683
Website: www.febi.uinsu.ac.id

Nomor : B-425/EB.I/PP.00.9/02/2018
Lamp : -
Hal : **Mohon Izin Pra Riset**

15 Maret 2018

Kepada Yth:
Pimpinan Koperasi Syari'ah
BMT Masyarakat Madani Sumut

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini kami tugaskan mahasiswa :

Nama : Bayu Lian Surbakti
NIM : 51143008
Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 24 Maret 1996
Sem/ Jurusan : VIII/Akuntansi Syariah

untuk melaksanakan riset di **Instansi/ Lembaga** yang Bapak/Ibu Pimpin. Kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Izin riset kepada mahasiswa tersebut, guna memperoleh data-data serta informasi yang berhubungan dengan Skripsinya

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,



Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP. 19630228 200312 1 002

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Bayu Lian Surbakti
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 24 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Banten Baru Kelambir V, Medan Helvetya
Anak ke : 4 dari 5 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Ishak Surbakti
Nama Ibu : Roosjida Batubara
Alamat : Jalan Banten Baru Kelambir v, Medan Helvetya

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 065854 Tamat Tahun 2008
2. MTS Amaliyah Sunggal Tamat Tahun 2011
3. MAN 2 Model Medan Tamat Tahun 2014
4. Tahun 2014-2018 tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.